

# Teater GloBALisme: Pariwisata, Interkoneksi Global, dan Nasib Manusia Bali di Garis Depan\*

I Ngurah Suryawan\*\*

## Abstract

The development of the tourism industry in Bali has had various implications. Apart from extraordinary social change, there is the issue of how Balinese men struggle to maintain their cultural identity in the midst of globalized tourism. Balinese men are at the frontier of a society where global powers meet to exploit natural and human resources for the sake of tourism. Some Balinese men have lost their historical relationship to Bali because their own land has been sold to investors. Origin and identity maintenance are no longer directed to the land or to certain communities, but rather to a never-never land, a (global) world without meaning that one is no longer able to localize (Laksono, 2009b). It is in this never-never space without meaning that we witness fragments and stories of Balinese men making use of opportunities, developing tactics, and even fighting against tourism, which Tsing (2005) has called friction. In this so-called friction, local identity and culture are continually reproduced, the beginning and end of which are difficult to fathom.

**Key words:** (cultural) tourism, globalization, frontier, tactics, never-never, friction.

## Pendahuluan

Ketut Pugeg (65) berjalan menepi saat mobil *BMW* biru tepat berada di belakangnya. Si pengendara mobil membuka kaca pintu. Seorang lelaki bule berkacamata hitam menengok dan memandangi Pugeg dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. Tidak ada senyum dari si bule, begitu juga dengan Pugeg. Hanya sepintas, mata mereka saling pandang, kemudian mobil melaju meninggalkan Pugeg. Badan Pugeg yang mulai ringkih

---

\* Beberapa bagian dalam artikel ini pernah ditulis dalam paper Seminar Internasional *Toward Harmonization in Tourism* yang dilaksanakan oleh Fakultas Pariwisata Universitas Udayana di Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana, 27 April 2010.

\* I Ngurah Suryawan adalah dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat, yang kini sedang menyelesaikan studi di Program S3 (Doktor) Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Email: ngurahsuryawan@gmail.com.

kembali berjalan menyusuri sebuah jalan di kawasan Kelurahan Kerobokan, Kabupaten Badung. Hanya diselimuti kaos putih polos kusam, menyelipkan sebuah arit di punggungnya, Pugeg berhenti di sebuah lahan penuh rumput. *“Dumun nike tanah tiange gus, mangkin sampun beli bule. Mangkin kanggeang tiang ngerereh maman sampi driki”* ujarnya sambil menunjuk bangunan villa mewah di sebelah lahan penuh rumput (Dulu itu tanah saya, tapi sekarang sudah dibeli oleh bule. Sekarang saya hanya di tanah ini mencari rumput untuk makan sapi).

Kini, yang tersisa hanyalah tanahnya ini. Itu pun sudah diincar makeler tanah dan dibujuk beberapa saudaranya untuk dijual saja. Memang tanah Pugeg berada di tepi jalan, sementara di sisi kanan dan kirinya sudah terbangun villa-villa mewah. Pugeg terjepit. Pernah ia berniat menjual tanah itu, tapi setelah itu tidurnya tidak tenang dan selalu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, leluhur Pugeg sangat marah kalau ia sampai menjual tanah warisan ini. Oleh karena itu, hingga saat ini ia bertekad sampai akhir hayatnya tidak akan pernah menjual sisa terakhir tanah warisan leluhurnya ini.<sup>1</sup>

Wilayah Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kini memang menjadi primadona kalangan ekspatriat dan kelas menengah Indonesia untuk berinvestasi. Berjejer-jejer villa megah dibangun hingga ke bibir-bibir pantai. Selain villa, sarana hiburan seperti café, diskotik serta ruko-ruko, salon, spa, pusat perbelanjaan, butik-butik dan restoran berbagai jenis makanan tanpa jenuh selalu hadir silih berganti di kawasan Kerobokan. Maka tidaklah heran jika sampai pagi buta, geliat kehidupan di Kerobokan tidak pernah terhenti. Semua sarana kebutuhan para ekspatriat telah terpenuhi di Kerobokan. Hanya dengan 10 menit bersepeda motor, mereka bisa menikmati dentum musik para DJ di diskotik-diskotik di wilayah Kuta.

Siapa yang membayangkan daerah Kerobokan akan seramai seperti sekarang? Seperti juga siapa yang menyangka Kuta

---

<sup>1</sup> Catatan lapangan pada Maret-April 2009.

akan menjadi “kampung internasional”. Saat tahun 1986, jalan-jalan di Kuta dan Kerobokan seperti dicatat Setia (1986; Sujaya, 2002) seperti kubangan kerbau. Malam hari gelap gulita tanpa adanya penerangan. Pantai Kuta, Seminyak, dan Loloan Yeh Poh, tiga pantai di kawasan Kuta-Canggu sangat kotor. Perahu-perahu nelayan berjejer menunggu melaut. Kuta kemudian lebih dulu berkembang berkat ide dari Dokter Made Mandara yang membenahi rumahnya untuk dijadikan penginapan temannya seorang bule. Langkahnya kemudian diikuti warga lainnya yang menyulap sebagian rumahnya untuk penginapan murah. Deburan ombak pantai Kuta untuk berselancar menjadi daya tarik tersendiri para para turis anak muda.

Maka, mulailah industri pariwisata menerjang Kuta. Seolah tanpa henti, pembangunan infrastruktur pariwisata melalap setiap jengkal tanah di seluruh wilayah Kuta. Saat pariwisata Kuta jenuh, yang menjadi incaran adalah daerah-daerah di sekitarnya yang masih “perawan” dari tangan-tangan investasi. Wilayah Kerobokan menjadi sasaran berikutnya pasca 1998, ketika kelompok kelas menengah kaya mencari lahan baru yang aman berinvestasi. Petani-petani Desa Kerobokan menjadi gagap, seolah tak percaya ketika para tukang kapling tanah membujuk mereka menjual tanah dengan harga yang menggiurkan ketika itu. Tak kuat menahan bayangan rupiah yang melimpah, tanah leluhur di Kerobokan perlahan-lahan namun pasti ludes terjual. Meski *desa pakraman* melarang warganya menjual tanah, banyak cara yang dilakukan untuk mensiasatinya. Salah satunya adalah meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *krama desa pakraman*, mengawini gadis Bali atau “kerjasama” dengan *krama desa pakraman* untuk berusaha (Kompas, 22 Februari 2008).

Kisah tersebut paling tidak bisa merefleksikan bagaimana manusia Bali memang benar-benar berada di wilayah *frontier* (garis depan). Ruang-ruang di garis depan bertemunya kekuatan-kekuatan global dalam rangka mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Bali. Penetrasi global melalui investasi pariwisata menjadi pemantik perubahan sosial

budaya paling nyata di Bali selama lebih dari 100 tahun.

Artikel ini mendiskusikan bagaimana masuknya investasi global bernama industri pariwisata tersebut menggugat nilai-nilai budaya masyarakat tempatan (Bali). Juga melahirkan beragam siasat-siasat perjuangan manusia Bali menegakkan identitas budaya di atas tanahnya sendiri. Dalam kondisi seperti inilah, ketika setiap jengkal nafas manusia Bali tergantung kucuran dollar industri pariwisata, terjadi ketegangan relasi historis manusia Bali dengan tanahnya. Tanah-tanah manusia Bali telah lama tergerus oleh rakusnya industri pariwisata untuk pembangunan infrastruktur. Alih fungsi lahan dan “hilangnya” tanah-tanah Bali dari ikatan relasi historis dengan manusianya terus terjadi. Tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh investor pariwisata yang sebelumnya sama sekali tidak punya relasi historis dengan tanah tersebut.

Artikel ini merefleksikan bagaimana sebenarnya implikasi pariwisata dalam mengkonstruksi identitas budaya Bali? Bagaimana fragmen-fragmen perjuangan manusia Bali dalam menegakkan identitas budaya di tengah tengah arus globalisasi pariwisata yang semakin deras?

### **Bali dan Papua: Potret Interkoneksi Global**

Kompleksitas masyarakat tempatan hari ini diantaranya adalah posisi mereka di tengah himpitan penetrasi modal yang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tangan-tangan eksploitasi tersebut dipraktikkan dengan sangat massif oleh perusahaan transnasional dalam bentuk jejaring kuasa kapital global. Di tengah terjangan tersebut, kisah-kisah pelantunan identitas budaya masyarakat tempatan berada di garda depan (*frontier*). Pada ruang-ruang interkoneksi jejaring kuasa politik global dan budaya masyarakat tempatan ini akan terlihat fragmen-fragmen siasat manusia memanfaatkan peluang ekonomi politik dan juga lantunan-lantunan kisah penegakkan identitas budayanya.

Kisah I Natur yang saya temui beberapa tahun lalu di sebuah

desa kecil di kaki pulau Bali memberikan kesan mendalam. Ia dan keluarganya dengan gigih mempertahankan tanahnya yang terus menerus diincar investor untuk pembangunan kompleks pariwisata megah. Sementara seluruh *krama* di desanya sudah melepaskan tanahnya, I Natur dan keluarga menempati tanahnya dikelilingi proyek megah pembangunan pariwisata. Tingginya bangunan menjulang infrastruktur pariwisata menenggelamkan rumah dan *sanggah* I Natur dan keluarga.

Saat saya menginjakkan kaki di Tanah Papua, saya beruntung mendengar kisah dari Mama Yance yang berjualan pinang di depan asrama dosen tempat saya tinggal. Mama bercerita bagaimana ia dan seorang anaknya berkebun di sebuah kampung di pinggiran kota. Selain berkebun pinang, mama dan anaknya juga menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Dua atau tiga kali seminggu mama berjualan hasil kebunnya ke pasar di kota atau menumpang berjualan sirih pinang di dekat kampus. Saingan mama bukan hanya para pendatang yang juga berjualan pinang, tapi para pedagang bermodal besar yang menghuni kios-kios di deretan terbawah pasar tingkat di pusat kota. Sementara Mama Yance hanya berjualan dengan menggelar karung *noken* (tas) di tanah dan kemudian menggelar dagangannya. Beberapa meter dari tempat Mama Yance berjualan, jaringan internasional hotel megah dan deretan supermarket dengan reklame makanan siap saji berdiri menjulang.

Negara dan modal berkolaborasi untuk menguasai jaringan-jaringan ekonomi makro yang merangsek ekonomi rakyat hingga ke titik nadir. Rekognisi dan tindakan afirmatif (pemihakan) terhadap perekonomian rakyat seakan hanya janji kosong para birokrat dan politisi. Deru investasi masuk tanpa henti menghasilkan deretan ruko, hotel, apartemen, supermarket, bahkan menyulap tanah masyarakat lokal menjadi perkebunan kelapa sawit hingga coklat. Pasar tradisional tempat mama-mama Papua berjualan minim sekali untuk terjamah anggaran dana otus atau APBD. "Pejabat *dong* (mereka) hanya pikir perut sendiri saja. *Tong* (kita) hanya bisa lihat bagaimana *dong baku tipu* (mereka

saling tipu) *sampeeeee* dana habis.” keluh mama-mama di pasar yang saya dengar.

Di Bali, sebagaimana kita tahu sama tahu, energi dan semua kemampuan masyarakat dimobilisasi untuk bersilat lidah dalam wacana pelestarian budaya. Didukung sponsor negara dengan aparatus dan modalnya, wacana tentang pelestarian budaya menjadi peluang bagi para akademisi, budayawan, politisi hingga hingga tokoh masyarakat mewacana pencanggihan pelestarian budaya. Gula-gulanya adalah siasat manusia mencari akses ekonomi politik dibawah *koor* pelestarian budaya.

Penggalian-penggalian otentisitas (keaslian) budaya inilah yang ditangkap oleh kuasa kapital global bernama pariwisata. Didukung oleh gerakan-gerakan kelas menengah baru dalam pencarian esensialisme, kebudayaan Bali menjadi komoditas kapitalisme kultural baru (Santikarma, 2003; Nordholt, 2010) yang sangat menjanjikan sekaligus memprihatinkan. Menjanjikan karena akan menjadi modal luar biasa dalam mengeksplor otentisitas dalam promosi pariwisata Bali. Memprihatinkan saya kira karena menutup ruang wacana kritik kebudayaan, yang melihat kebudayaan sebagai yang cair, dinamis, dan pewacanaan kebudayaan sebagai refleksi manusia Bali sendiri.

Di tengah interkoneksi global yang menerjang masyarakat tempatan, menegakkan identitas diri menjadi sesuatu yang sulit sekaligus paradoks. Gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan kini praksis terjebak dalam lingkaran interkoneksi global ini. Masyarakat yang sedang bergerak ini terus mencari konstruksinya sendiri di tengah bentangan dunia sebagai pasar global. Gerakan-gerakan sosial mewakili komunitas tempatan, adat, atau revitalisasi kebudayaan kadang tidak terlepas dari penetrasi kuasa global kapital ini. Lantunan gerakan penguatan kebudayaan *Ajeg Bali* (baca: pencarian otentisitas nilai budaya Bali) tidak semurni untuk *nindihin* Bali (membela Bali) seperti apa yang sering dimuat di media-media lokal, tapi penuh dengan tipu muslihat dan kisah-kisah interkoneksi yang aneh dengan kuasa kapital bernama pariwisata, industri media, dan romantisasi

keagungan kebudayaan Bali.

Fragmen-fragmen (penggalan kisah-kisah tak beraturan) manusia di garis depan (*frontier*) inilah yang oleh Anna Lauwenhaupt Tsing (2005) disebut dengan friksi (*friction*), ruang “hampa makna” manusia di tengah interkoneksi global. Manusia-manusia bersiasat saling tikam, *baku tipu* memanfaatkan peluang-peluang yang dihadirkan oleh investasi dan kuasa global kapital. Negara dan hukum absen bahkan menjadi salah satu pion dalam jejaring global ini. Yang ada hanyalah persaingan kekuatan modal dan gembar-gembor kisah-kisah fantastis penciptaan komoditas. Pada ruang-ruang inilah, masyarakat tempatan berada di ruang hampa makna, ketika penegakan identitas tidak bisa serta merta mendaku kepada tanahnya yang telah dikuasai kuasa modal global.

Dalam ruang friksi inilah seluruh gerak kekuatan masyarakat terinfeksi kuasa modal global. Identitas dan kebudayaan lokal direproduksi menjadi komoditas yang diceritakan, “diomong kosongkan”, dilebih-lebihkan untuk kemudian diwariskan dan didramatisir menjadi komoditas bernama otentisitas. Pada momen inilah pelemahan-pelemahan gerakan rakyat terus menerus tanpa henti.

Rekognisi terhadap gerakan rakyat dan penegakan identitas budaya masyarakat tempatan tertelan kuasa global kapital. Rekognisi terhadap pemberdayaan petani di Bali tertimbun wacana pelestarian budaya dan isu global pariwisata. Penetrasi modal menggerus tanah-tanah manusia Bali untuk infrastruktur pariwisata. Lahan persawahan terhimpit gedung-gedung ruko atau jejeran vila-vila di pinggir tebing. Bahkan, pemandangan persawahan menjadi komoditas untuk pariwisata.

Jauh di kampung-kampung pegunungan Papua, pembangunan infrastruktur jalan menembus daerah-daerah terisolir. Alih fungsi lahan yang dimiliki masyarakat lokal disulap menjadi perkebunan dan kelapa sawit ratusan hektar. Introduksi program transmigrasi menggerus tanah-tanah adat untuk pemukiman penduduk dan daerah pertanian. Dengan

dana otonomi khusus, pembangunan infrastruktur terus digenjot tanpa henti.

Namun, tetap saja kisah kesuksesan pariwisata di Bali dan pembangunan infrastruktur di Papua menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana rekognisi terhadap masyarakat lokal? Di Bali mungkin kita belum terbuka untuk mengakui “kisah kelam” manusia-manusia Bali yang “dikalahkan” untuk pariwisata, yang tanahnya direbut, dan hidupnya yang dimiskinkan. Di Papua, kancangnya pembangunan infrastruktur meninggalkan pemberdayaan ekonomi penduduk asli Papua. Jaringan perdagangan dan toko-toko penuh sesak dengan para pendatang yang menjadi pelayan atau pegawai. Sementara masyarakat asli Papua tetap berjualan sirih pinang dan hasil bumi di pasar tradisional.

### **Retorika (Genealogi) Pariwisata (Globalisasi) Budaya<sup>2</sup>**

Dalam catatan sejarah perkembangan pariwisata Bali, nama KPM (*Koninklijk Paketvaart Maatschappij*), di tahun 1920-an mempropagandakan Bali sebagai daerah tujuan wisata. Namun sebelumnya telah datang seorang anggota parlemen Belanda, Heer H. van Kol, yang mengunjungi Bali pada 4 Juli 1902. Kol dianggap sebagai wisatawan pertama yang datang ke Bali. Setelah mengunjungi Bali, Kol menulis buku *Uit Onze Kolonien* yang diterbitkan di Leiden, Belanda pada 1902. Dalam buku setebal 826 halaman tersebut, 123 halaman menceritakan tentang Bali (Pitana, 1999: 10). Melalui kongsi dagang pelayaran inilah, promosi kepariwisataan Bali menjadi terlembaga. Praktis setelah itu KPM mulai menarik penumpang-penumpangannya untuk menawarkan kunjungan wisata ke pulau tropis nan indah bernama Bali.

Bali Pada zaman kolonial, terjadi begitu banyak tragedi kekerasan yang disimpan rapi oleh rezim kolonial Belanda dalam proyek pentradisian Bali. Proyek “pentradisian” Bali

---

<sup>2</sup> Beberapa bahan dalam bagian ini dipublikasikan dalam I Nguh Suryawan, *Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara di Bali Utara* (Jakarta: Prenada Media, 2010)



yang dikenal dengan ideologi *Baliseering* menjadi roh dalam kehidupan politik politik kebudayaan Bali masa Bali. Bagian ini akan menguraikan genealogi Bali masa kolonial “diciptakan” oleh rezim kolonial Belanda. Proyek “penciptaan sorga rekayasa” tersebut berlangsung menyentuh jantung kehidupan kebudayaan dan kesenian di Bali.

Perjalanan panjang politik kebudayaan Bali adalah pentas kuasa yang menjadi salah satu bidang pertarungan dalam praktek kolonisasi yang kemudian menimpa Bali. Kehidupan kesenian, seni lukis wayang, seni pertunjukan misalnya, berkembang dengan landasan kebudayaan dan agama Hindu Bali yang kental. Ritual memang bukan satu-satunya citra yang membentuk Bali, tapi juga sejarah pertarungan dan perebutan kekuasaan politik dari raja-raja di Bali dalam menanamkan jelas menampakkan pengaruhnya.

Tapi dibalik perang saudara dan kekerasan yang terjadi silih berganti, Bali pada zaman penjajahan kolonial (1908–1942) terlihat *rust en orde* (damai dan tertib). Ketertiban dan kedamaian yang berlangsung semu memudahkan rezim kolonial untuk melancarkan praktik-praktik penguasaannya terhadap Bali. Beberapa kebijakan-kebijakan kolonial memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi lama serta membangkitkan ketegangan baru. Robinson (2006: 19) menguraikan, rezim kolonial dibikin cemas oleh apa yang dilihat sebagai bukti dari bangkitnya “komunisme” dan “nasionalisme” pada decade 1920-an. Karena itulah rezim kolonial melancarkan kebijakan memulihkan “tradisi” Bali. Proyek ini menuntut dihidupkannya kembali –dalam sejumlah kasus, diciptakannya—berbagai praktik kultural, religius dan hukum yang “tradisional”. Proyek ini (baca: Balinisasi) juga meminta dipulihkannya keluarga-keluarga penguasa lama, yang para anggota terkemukanya, yang pernah dianggap lalim oleh Belanda dan dikirim ke pengasingan, kini dipandang sebagai penjamin mutlak dari tatanan “tradisional” yang harmonis.

Melalui politik kebudayaan itulah cengkraman kekuasaan kolonial yang membentuk Bali dimulai dari sebuah momen puncak kekuasaan tahun 1920-an, yang kemudian dilanjutkan

dengan program “pemberdayaan” tradisi. Dari hasil catatan lapangan pejabat kolonial, maka dibuatlah penggambaran bahwa masyarakat Bali adalah orang yang mempunyai minat pada seni, budaya, agama, tari, musik, lukis, ukir, upacara, festival ketimbang “politik” (Robinson, 2006: 8).

Karena itulah politik citra Bali sebagai “museum hidup” menjadi nilai jual yang sangat berharga bagi pariwisata. Dan sejarah pariwisata di Bali tidak bisa dilepaskan dari bagaimana intervensi kolonial Belanda dalam mempromosikan Bali, dan setali tiga uang di dalamnya membentuk bayangan atas pulau dewata ini. Selain itu, yang lebih detail diungkapkan juga citra akan watak manusia Bali. Sebuah studi yang cukup berpengaruh membentuk pemahaman dan keyakinan masyarakat Bali tentang wataknya sendiri hingga kini. Gregory Bateson dalam sebuah karangannya mengatakan watak masyarakat Bali sebagai “Keadaan yang Mantap.” “Keadaan Mantap” demikian—kondisi emosional orang Bali—berciri khas perubahan yang seimbang dan “non-progresif” (Nordholt, 2002: 185)

Maka dimulailah konstruksi citra Bali, dan kepentingan ekonomi politik kolonial masuk dalam rekayasa membangun image Bali. Salah satunya adalah pesanan dari jaringan rezim kolonial atas karya-karya seni Bali yang dianggap eksotik, asli dari dunia timur yang “asing”, “mistis” dan sorga bagi warga dunia di barat. Pandangan orientalis ini menjadi pondasi berubahnya citra terhadap Bali. Landasan sosial religius seni lukis Bali lama tergerus dengan pesanan karya-karya yang mereproduksi eksotika Bali dalam lukisan pewayangan dan citra akan dunia pewayangan dan “mistik” seperti bayangan para pelancong dan rezim kolonial.

Proyek *Balinisasi* yang menempatkan Bali sebagai museum hidup dengan keunikan kebudayaannya, berlangsung menjadi landasan praktek kehidupan politik kebudayaan dan kesenian di Bali. Rezim kolonial merombak dan membongkar semua citra kebudayaan Bali menjadi romantik yang mempesona pihak luar, yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kolonial

untuk mengeksploitasi Bali. Proyek perombakan budaya dan pentradisian Bali itu terkenal dengan nama *Baliseering* (Balinisasi). Menurut pihak Belanda, orang Bali harus berbusana “Bali”; teknik-teknik konstruksi modern, tak peduli betaapapun praktis atau menariknya bagi para pemakainya, ditetapkan sebagai “buruk” secara estetis, dan karena itu harus dihindari.

Globalisasi pariwisata di Bali mulai nyata saat rezim Orde Baru berkuasa. Pembukaan hubungan terhadap dunia barat dilaksanakan sejak tahun 1966, dengan pembentukan suatu Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang anggotanya terdiri International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (IBRD), serta negara-negara industri besar. Pada tahun 1967, dikeluarkan undang-undang yang bertujuan menarik penanaman modal asing, disertai berbagai prosedur kontrol supaya penanaman modal itu sesuai dengan kepentingan Indonesia. Tahun berikutnya, Bank Dunia membuka perwakilan di Jakarta, yang kelak bakal berperan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi Orde Baru, baik dari sudut sumber pendanaan maupun dari sudut orientasinya. (Picard, 2006: 60-61)

Bali menjadi etalase dan daerah percontohan pembangunan pariwisata di Indonesia. Karena itulah rezim Orde Baru yang berkepentingan untuk mendatangkan investor ke Indonesia memanfaatkan Bali sebagai daya tarik dengan industri pariwisatanya. Maka pada Maret 1969 pemerintah mengundang tim ahli asing untuk memikirkan pariwisata Bali. Pemerintah mendapatkan bantuan dari IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) dan UNDP (*United Nations Development Program*) menyusun rencana induk pariwisata Bali yang dikerjakan oleh konsultan Perancis yaitu SCETO (*Societe Centrale Pour l'Equipment Touristique Outre-Mer*). Tahun 1972 SCETO memberikan rancang pariwisata dalam pengembangan pariwisata Bali adalah pariwisata budaya (*cultural tourism*). Pariwisata budaya dalam konteks Bali diartikan sebagai pengembangan pariwisata yang sedemikian rupa sehingga wisatawan dapat menikmati kebudayaan Bali, seperti menyaksikan tari-tarian

Bali, mengunjungi objek budaya (museum, pura, peninggalan purbakala), atau membeli cinderamata khas Bali, tetapi pada saat yang sama juga berhasil melakukan konservasi terhadap kebudayaan Bali dari pengaruh pariwisata. Dengan kata lain, pengembangan pariwisata Bali harus mengakomodasi dua sisi yang bertentangan pada saat yang sama, yaitu menggunakan kebudayaan sebagai daya tarik utama untuk mengundang wisatawan, dan pada saat yang sama juga melindungi kebudayaan dari pengaruh pariwisata. (Pitana, 1999: 19-20)

Lebih detail, Picard (2006) dengan mengutip pidato Gubernur Bali Soekarmen pada seminar tahun 1971 menguraikan rumusan pariwisata budaya:

“Pariwisata sebagai *genus proximum* serta budaya sebagai *differentia specifica* membawa konsekuensi yang berat karena predikat budaya membatasi pengertian pariwisata. Segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai seni dan budaya tidak boleh dilaksanakan. Demikian pula industri-industri pariwisata kita haruslah industri pariwisata budaya, suatu industri yang bahan bakunya dan yang “dijual” adalah kebudayaan itu sendiri, dengan batas-batas bahwa pengembangan kepariwisataan itu tidak boleh berakibat merosotnya nilai-nilai kebudayaan kita yang merupakan daya tarik pokok bagi seorang wisatawan untuk berkunjung ke Bali” (Picard, 2006: 187 dengan mengutip Seminar 1971).

Secara tajam, Picard (2006) ingin mengungkapkan: tidaklah cukup pariwisata Bali menjadi “pariwisata budaya” tapi harus juga kebudayaan Bali menjadi, dalam batas tertentu, “pariwisata budaya”. Keharusan ini menimbulkan dalam wacana orang Bali suatu sikap mendua pada cara mereka menanggapi kebudayaan mereka, apakah dikaitkan dengan pariwisata atau tidak. Bila sebelum kedatangan wisatawan kebudayaan ditanggapi sebagai “warisan” yang harus diselamatkan, sebaliknya setelah kehadiran wisatawan kebudayaan Bali berubah dianggap menjadi suatu “modal” yang harus dilipatgandakan.

Dalam wacana Pariwisata Budaya, “kebudayaan Bali” selalu dikaitkan dengan tiga unsur, yang merupakan tiga lapis yang

betumpang tindih satu sama lainnya: bersumber pada agama Hindu, emngilhami adapt-istiadat masyarakat dan menjiwai lembaga adat, dan menjelma dalam bentuk seni yang bernilai tinggi (Picard, 2006: 269).

Operasi kekuasaan dalam memanfaatkan “kebudayaan Bali” sebagai nilai berharga menghasilkan sebuah kesan menjadikan Bali sebagai “museum hidup seni dan kebudayaan” dengan gincu dan pemanis bernama industri pariwisata yang menjanjikan kehidupan glamour pada rakyat Bali. Rezim Orde Baru dengan bujuk rayunya itu masuk dalam operasi kuasa di setiap jengkal kehidupan rakyat Bali yang paling privat. Operasi kekuasaan itu hadir lewat program-program pemerintah, ataupun lewat *agency* manusia-manusia Orde Baru lewat desa adat bahkan keluarga. Karena itulah kehebatan dari rezim Orde Baru (baca: kuasanya) adalah menampilkan diri dalam bentuk program atau rencana yang bersifat alamiah, apolitis, dan sah. Degung Santikarma mencontohkan beberapa operasi kekuasaan tersebut. Di kampus dia (baca: kuasa) masuk dalam bentuk “normalisasi”. Di rumah tangga dia masuk dalam ilmu PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). Di sini, kuasa telah membadan, dia bukan lagi membentuk bangunan monolitik (Santikarma, n.d.)

Tersebarnya dengan produktif kuasa tersebut berbuah kemegahan pariwisata dan sejahteranya masyarakat Bali. Berbagai sendi kehidupan masyarakat di kesenian dan kebudayaan “diarahkan” oleh sang kuasa untuk mendukung pariwisata. Daya tarik kebudayaan bagi masyarakat Bali adalah modal yang harus dimanfaatkan untuk mengeruk gemerincing dollar dari para turis. Tidak salah memang, pembangunan pariwisata memang menjadi duet yang manis dan menjanjikan saat konsolidasi kekuasaan Orde Baru awal tahun 1980-an.

Di balik semua itu, cita-cita utopis politik kebudayaan Bali ketika itu memang diarahkan untuk menggerakkan bidang yang potensial bernama kebudayaan untuk mendukung pariwisata. Seperti diungkapkan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, peletak dasar ideology pariwisata budaya, yang menyatakan modal dasar

kebudayaan Bali berfungsi secara normatif dan operasional. Sebagai normative peranan kebudayaan diharapkan mampu dan potensial dalam memberikan identitas, pegangan dasar, pola pengendalian, sehingga keseimbangan dan ketahanan budaya dapat diwujudkan. Secara operasional, kebudayaan juga diharapkan mampu menjadi daya tarik utama bagi peningkatan pariwisata. Ini memberikan petunjuk betapa pentingnya peranan kebudayaan bagi pengembangan pariwisata. Jadi bukan berarti kebudayaan untuk pariwisata tetapi sebaliknya pariwisata untuk kebudayaan. Dan kebudayaan di sini bukan hanya berfungsi untuk dinikmati, tetapi juga sebagai media untuk membawa saling pengertian dan hormat-menghormati (Mantra, 1996: 35)

Perspektif utopis dan “harmonisasi” dalam melihat relasi pariwisata, budaya, pembangunan, dan kekuasaan itulah yang melandasi politik kebudayaan Bali 30 tahun lebih lamanya. Tidak terhindarkan memang, yang terjadi kemudian adalah menyebarnya operasi kekuasaan dari jejaring budaya, pembangunan, dan negara (baca: kekuasaan) tersebut dengan alamiah, seolah tanpa sadar, dan terkelabui oleh cita-cita luhur untuk membangun pariwisata budaya di Bali yang berkelanjutan. Operasi kekuasaan yang produktif itulah yang menghasilkan pembudayaan wacana “Pariwisata Budaya” menjadi kitab dalam politik kebudayaan Bali pasca 1965. Depolitisasi berlangsung hampir menyentuh seluruh kehidupan masyarakat. Maka yang terlahir kemudian adalah generasi apolitis, pragmatis, bermental kerja dan penurut.

Bagaimana misalnya sibuknya perempuan Bali yang mempercantik dirinya untuk tampak manis di hadapan Tim Penilai Lomba Desa Adat. Gengsi dan glamour ritual itu seolah menunjukkan bagaimana telah terlaksananya pemberdayaan adat untuk mendukung pariwisata Bali. Padahal di balik semua itu terdapat landasan yang rapuh dari harmoni dan meriahnya lomba pemberdayaan desa adat di Bali.

Begitulah pentas politik kebudayaan Bali diciptakan oleh rezim kekuasaan. Depolitisasi, harmonisasi, dan penyeragaman

dilakukan untuk membentuk “manusia Indonesia seutuhnya” dan manusia Bali berguna dan berdaya untuk pariwisata. Harmonisasi dan keamanan adalah persyaratan mutlak bagi daerah destinasi pariwisata seperti Bali. Karena Bali harus aman, maka harus “diamankan” dengan pendekatan keamanan. Dari itulah lahirnya manusia-manusia Orde Baru yang etno-nasionalis, konservatif, fundamentalis, dan yang terpenting apolitis. Hal ini diwujudkan dengan semakin menguatnya politik etnis seiring berjalannya pariwisata. Wacana kapitalistik dan industrial seperti pariwisata melahirkan wacana hak milik kebudayaan bagi masyarakat Bali.

Politik identitas “pariwisata budaya Bali”, yang diikuti dengan penguatan identitas etnis, menyertai perkembangan pariwisata. Pariwisata, kebudayaan, dan kekuasaan mereproduksi identitas etnis dan hak milik kebudayaan. Karena hanya itulah yang menjadi senjata sakti dan “jualan” dari “pariwisata budaya” di Bali. Ini diwujudkan dengan klaim dan citra, “budaya Balilah yang eksotik dan asli”.

Politik puja-puji terhadap Bali juga mewarnai bagaimana strategi Orde Baru untuk menaklukkan seni dan kebudayaan di Bali. Politik pujian ini dimulai dari rezim kolonial dalam membentuk citra dan budaya Bali. Istilah setiap orang Bali adalah seniman”, “manusia Bali mencintai kedamaian”, dan “Bali adalah pusat kreatifitas Indonesia” dimanfaatkan oleh rezim Orde Baru sebagai investasi untuk menyedot datangnya dollar dalam bentuk “pariwisata budaya”. Gambaran etnografi yang dibuat oleh orang luar ini pun terus dihembus-hembuskan dan dijadikan suatu sertifikat bukti diri dan kebanggaan ke-Bali-an mereka.

Dasar dari doktrin Pariwisata Budaya tersebut jelaslah tidak bisa dilepaskan dari kuasa kolonial dalam pembentukan citra Bali, dan juga paradigma menjadikan budaya sebagai “modal dan hak milik” yang dijual dalam topeng pariwisata. Dengan kembali melihat konstruksi kolonial terhadap Bali yang “tradisi”, unik dan harmonis itu, kita akan dibawa oleh melihat bagaimana transformasi kekuasaan kolonial diterjemahkan dengan sangat apik oleh tangan-tangan rezim otoritarian Orde Baru.

Kelahiran “manusia-manusia Orde Baru” berdiri dengan dasar politik kekuasaan kolonial yang menyentuh seluruh lapisan kehidupan dan pikiran manusia Bali. Tapi sayangnya, relasi kekuasaan kolonial tersebut terwarisi hingga kini dan membentuk pikiran, tindakan, dan sikap budaya manusia Bali sendiri. Pada titik inilah, kekuasaan telah beroperasi dengan sangat produktif dan efektif; ketika ia (kekuasaan tersebut) diilmiahkan keberadaannya. Seperti juga “warisan kebudayaan” Bali yang kita terima hingga kini. Padahal di balik semuanya, terdapat jejaring kekuasaan yang menciptakan adat/istiadat, ritual, kebudayaan, hukum adat, politik, dan sudah pasti relasi social dalam masyarakat Bali. Semuanya menjadi agenda kekuasaan rezim kolonial untuk mengatur, mendisiplinkan, menertibkan masyarakat daerah jajahannya. Mahluk bernama pariwisatalah yang merubah total Bali hingga sekarang. Saat Orde Baru berkuasa, rakyat Bali dibungkam dengan jargon manis “pariwisata budaya”. Namun dibalik itu, yang senyatanya terjadi adalah “pariwisata resort” (Picard, 2006; Vickers, 1989) yang mengeruk tanah-tanah Bali untuk dibangun infrastruktur pariwisata megah.

Tertangkap kuatnya ideologi “Pariwisata Budaya” bukannya tanpa resistensi. Seiring dengan perubahan secara nyata orientasi Bali dari pertanian ke pariwisata (Bagus, 1999; Mudana, 2005), banyak terjadi perubahan secara struktural serta pola pikir manusia Bali. Pariwisata memegang peranan yang sangat penting kalau tidak dikatakan terpenting di dalam perekonomian Bali. Ini terbukti dari menurunnya sumbangan sektor pertanian pada tahun 1997 hanya 19,33 %, sedangkan sektor pariwisata, terutama dalam bidang-bidang tertentu seperti perdagangan, hotel dan restoran pada tahun yang sama adalah sebesar 30, 5%. Dengan demikian secara keseluruhan telah terjadi peralihan dari budaya agraris ke budaya non-agraris, khususnya yang menyangkut “industri budaya” karena pariwisata kini telah menjadi bagian dari kebudayaan Bali (Bagus, 1999: 615).

Menurut Bagus (1999: 615-616), kebijakan penerbangan langsung ke Bali serta penanaman modal berskala besar di



sektor pariwisata pada tahun 1980-an, membuat pariwisata bercorak kapitalisme menerjang Bali. Kondisi ini didukung oleh kebijakan lokal (Bali) di bawah pemerintahan Gubernur Ida Bagus Oka, yaitu dengan dikeluarkannya SK Gubernur No. 528/1993 yang menentukan “21 Kawasan Wisata”. Untuk kepentingan pengembangan pariwisata, Bali dikapling menjadi 21 kawasan yang siap dijual. SK tersebut kemudian didukung penuh oleh DPRD Tk. I Bali, yang *nota bene* dikuasai oleh Golkar. Kebijakan pemerintah tersebut akhirnya tertuang dalam Perda (Peraturan Daerah) No. 4 tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang kemudian diperbaharui menjadi Kawasan Daerah Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) dalam Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali 2009-2029 yang hingga kini masih menjadi perdebatan di Bali. Penetrasi kepentingan modal dalam investasi pariwisata masuk wilayah-wilayah desa pakraman dan memecah belah kepentingan rakyat Bali. Fragmentasi kepentingan antara rakyat Bali menjadi peluang penetrasi kuasa global pariwisata yang mendaku tanah rakyat Bali dengan kekuatan investasi modal. Tangan-tangan kekuasaan dipraktikkan rakyat Bali yang menjadi agen-agen industri pariwisata membuat perdebatan antara melaksanakan dan merevisi RTRW Bali menjadi pentas praktik kuasa global yang terjadi di Bali.

Dengan tajam Bagus (1999: 616) sebenarnya telah menunjukkan bahwa peraturan sebelumnya yang tertuang dalam SK Gubernur serta Perda No. 4 Tahun 1996 tersebut bertujuan memperoleh PAD (Pendapatan Asli daerah) yang lebih besar dari masing-masing kabupaten di Bali, yang selama ini hanya beberapa diantaranya yang menikmati hasil pariwisata. Kawasan-kawasan yang baru diterapkan itu menjadi incaran bagi investor untuk datang menanam modalnya di Bali. Tak ayal lagi, kebijakan baru pemerintah ini bagai air bah. Para investor menyerbu membeli dan mengkavling ribuan hektar tanah Bali. Modus operandi untuk mendapatkan tanah murah “untuk kepentingan pembangunan nasional” ialah membangun pelbagai sarana pariwisata seperti

hotel, sarana rekreasi, lapangan golf, dan sebagainya. Bahkan penggunaan cara-cara yang kurang wajar seperti mengancam, menekan, mengintimidasi, dan memberi ganti rugi yang tidak wajar kepada pemilik tanah, senantiasa menghiasi perolehan tanah-tanah tersebut. Karena demikian derasnya pembangunan pariwisata dengan pemanfaatan tanah yang begitu besar, maka tanah Bali pada suatu kurun tertentu telah berkurang 1000 hektar tiap tahunnya. Dengan kata lain, tanah-tanah di Bali telah terjadi alih fungsi dari pertanian ke non pertanian. Dengan demikian, jelaslah Bali mengalami perubahan besar secara fisik, akibat pembangunan pariwisata, dan tidak sedikit permasalahan-permasalahan baru yang muncul di tengah masyarakat

Studi Mudana (2005) tentang hegemoni dan perlawanan petani Beraban terhadap pembangunan Bakrie Nirwana Resort (BNR) menunjukkan pengembangan pariwisata Bali tidak mempedulikan aspirasi “dari bawah” (masyarakat). Di samping itu, kekuasaan negara Orde Baru di pusat (baca: Jakarta) mempunyai agen-agen di tingkat lokal (Bali), sebagai tangan-tangan kroni Soeharto, keluarga Cendana. Di tengah rasa frustrasi masyarakat Bali akibat proyek-proyek pariwisata yang tidak memihak, mereka menilai lemahnya kepemimpinan lokal (daerah Bali) sebagai biang keladinya. Ia menuliskan:

Sosok Ida Bagus Oka memang “sangat Orde Baru” dan menjalin hubungan tertentu dengan pejabat Pusat (di Jakarta) dan pengusaha besar (konglomerat), sehingga oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya ia dicitrakan sebagai perantara bagi kepentingan politik dan ekonomi Jakarta. Namanyapun diplesetkan menjadi “Ida Bagus Oke” atau “Pak Oke” karena digambarkan selalu “oke-oke” (setuju) di hadapan kalangan penguasa dan pengusaha tersebut. Kenyataan menunjukkan, di bawah kekuasaannya, satu per satu tanah di Bali jatuh ke tangan pemodal besar yang hampir seluruhnya berasal dari luar Bali (Mudana, 2005: 6).

Bagus (1999: 617) melanjutkan, selama dua periode kepemimpinannya (1989–1998), Gubernur Ida Bagus Oka menjalankan kebijakan “yang mulanya memang berikhtiar untuk

memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Bali”, ternyata lebih berekses negatif. Dengan tidak bermaksud mengurangi atau memanipulasi pelbagai kemajuan yang telah dicapai selama pemerintahannya, Bagus (1999) menunjukkan harus diakui pula bahwa pelbagai hujatan dan kritik pedas (bahkan beberapa kali didemo oleh mahasiswa atau kelompok masyarakat lain) berkaitan dengan kebijakannya yang menjadi bukti bahwa “kebijakan Gubernur Oka tidak berpihak pada masyarakat bawah”.

Pembangunan BNR meliputi 121 hektar terdiri dari sebuah hotel mewah dengan 300 kamar, suatu kompleks perumahan dengan 152 villa, beberapa *condominium* bertingkat dengan 330 apartemen dan sebuah lapangan golf dengan 18 *holes*. Dibangun oleh konglomerat bakrie dari Jakarta, 324 juta dolar yang dibutuhkan proyek tersebut dibiayai sebanyak 80 % dengan bantuan modal asing. Inilah tahap pertama dari suatu resort baru yang direncanakan meliputi 600 hektar, atau lebih besar dari Nusa Dua (Picard, 2006: 284).

Kasus BNR dimulai pada awal dasawarsa 1990-an ketika tanah-tanah mulai dicoba dibebaskan. Pembangunan fisiknya dimulai sejak awal tahun 1993 dan diselesaikan dalam waktu empat tahun dengan peresmiannya pada tahun 1997 tetapi hingga saat ini pun, atau sekitar satu dasawarsa kemudian, yaitu ketika reformasi di Indonesia sudah bergulit, beberapa penyelesaian tanah antara pihak pengusaha (BNR) dan petani pemilik tanah belum dapat dikatakan benar-benar selesai secara elegan. Diantaranya, adalah petani Nang Lecir yang memiliki tanah seluas (41 are) di antara para petani pemilik tanah di lokasi BNR masih mengganjal sampai kini padahal ia sudah meninggal pada tahun 2003 (Mudana, 2005: 173).

Pembangunan BNR salah satunya menunjukkan bagaimana hubungan yang hegemonik antara negara dan rakyat Bali yang melakukan perlawanan. BNR adalah salah satu bukti, diantara banyak bukti penancapan kekuasaan negara Orde Baru. Khususnya di Bali, Orde Baru sangat berkuasa pada pemerintahan Gubernur Ida Bagus Oka. Rentang waktu 10 tahun Bali merasakan

indoktrinasi wacana-wacana pembangunan yang khas. Bahkan dalam bahasa Mudana (2005: 170), kalau dikenakan sebuah orde, Bali pada masa itu adalah “Orde Pariwisata” dengan wacana pengembangan pariwisata lewat kawasan-kawasan wisata yang dibangun, lengkap dengan sarana dan prasarannya. Hanya, pariwisata tidak saja menimbulkan dampak positif, seperti kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja dalam pengertian yang sebenarnya tetapi juga dampak negatif di sejumlah bidang kehidupan, baik lingkungan maupun sosial-budaya dan agama.

Tapi, selain analisis hegemoni dari Mudana (2005), Picard (2006) melihat bahwa bukan tergerusnya tanah oleh pariwisata yang menjadi pemicu protes BNR, tapi persoalan tempat suci agama Hindu (Pura Tanah Lot) yang merasa “dicemari”.

Meskipun banyak kecaman menyangkut peralihan sawah subur menjadi lahan hiburan segelintir orang kaya yang bergoyang kaki saja, dan sejumlah petani sekitarnya menolak selama beberapa waktu untuk menjual tanah mereka, inti masalahnya sesungguhnya bukanlah soal tanah tetapi agama. Secara bulat, para penentang proyek menggarisbawahi bahwa Tanah Lot adalah lambang Pulau Bali di mata dunia dan bahwa orang Bali memandangnya sebagai simbol identitas meeka. Itulah yang membuat mereka menentang BNR, dengan menegaskan bahwa pura akan dicemarkan oleh resort dan menuduh pemerintah menginjak-nginjak agama Hindu untuk menarik wisatawan (Picard, 2006: 285)

Picard (2006: 285) menilai bahwa pada kenyataannya agamalah yang paling efisien, dan paling peka, sebagai sarana untuk mengerahkan opini umum melawan proyek, seperti nampak pada dukungan yang seketika muncul dari kalangan mahasiswa dan cendekiawan Hindu se-Indonesia. Yang paling radikal di antara mereka menyerukan Parisada Hindu Dharma (PHDI)—lembaga terbesar umat Hindu—tampil sebagai pembela agama. Bahkan ada yang menuduh lembaga umat Hindu ini sebagai tukang cap pemerintah.

Akhirnya PHDI Pusat mengeluarkan *bhisama* (keputusan) kesucian pura. *Bhisama* ini merupakan hasil *paruman* (rapat)

*sulinggih* (pendeta) dan *walaka* (pengurus PHDI) yang antara lain menegaskan, “bahwa daerah kekeran radius kesucian Pura *Dangkhayangan* minimal 2 (dua) km. Dan minimal 5 (lima) km untuk Pura *Sadkhayangan*. Surat bhisama kesucian pura yang bernomor: 55/Z/X/PHDIP/1994 kemudian diperkuat oleh Instruksi Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara Nomor: M61/N. Sek.neg/03/1994 dan sebelumnya Gubernur mengeluarkan surat Edaran Gubernur Daerah Tingkat I Bali Nomor 640/273/27326/Bangda/1989, tanggal 30 Oktober 1989. Dalam kaitan ini Presiden Soeharto pun turun tangan (Bagus, 1999: 618).

Namun, PHDI malah berkompromi dengan pemerintah, bukan sebagai pembela agama Hindu. Para investor bersedia merubah periklanan mereka untuk menangkis kecaman bahwa mereka untuk menangkis kecaman bahwa mereka mengeksploitasi agama Hindu untuk tujuan komersial. Picard (2006:286) mencatat, iklan-iklan tersebut memakai dengan leluasa citra Pura Tanah Lot, yang tersohor di dunia pariwisata sebagai bayangan indah yang melatarbelakangi matahari yang sedang terbenam. Adapun prasarana pariwisata kawasan Tanah Lot, di luar beberapa penyesuaian kecil, tidak tampak perombakan yang berarti. Sementara itu, ABRI turun tangan untuk meredam demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dan artikel-artikel tentang BNR lenyap di halaman muka *Bali Post*. Pada bulan Mei 1994, pemerintah menetapkan kembali persetujuan untuk proyek itu dan pekerjaan lapangan, yang sempat terhenti sejak Januari 1994, dimulai kembali pada bulan September 1994.

Dalam catatan Bagus (1999), bagaikan bola salju, pengembangan pariwisata yang melalap tanah yang begitu luas kembali menggelinding. Dari BNR Tanah Lot ke BPG (Bali Pecatu Graha) di Desa Pecatu, Badung, ke Selasih, Payangan Gianyar (pembangunan lapangan golf terbesar yang melahap ratusan hektar tanah produktif milik rakyat). Proyek-proyek tersebut pada akhirnya bisa mewujudkan rencananya walaupun ditentang oleh mahasiswa dan masyarakat.

Wirata (2002) dengan satir melukiskan, turis-turis barangkali

sedang melahap santap siang dalam latar pemandangan eksotis petani di pedesaan di Kintamani, ketika di sudut lain Desa Pecatu seorang petani bernama Made Dana, di tahun 1998, tertunduk lesu karena tanahnya dirampas investor yang berkonspirasi dengan kekuasaan.

Di obyek-obyek wisata, wisatawan menyaksikan pesona Bali dengan pelayan yang tersenyum ramah, sementara di Pecatu orang kehilangan hak dan harga diri di hadapan kekuasaan kapitalis. Pada kesempatan yang lain, pada suatu malam hari *pengerupukan*—ketikaumat Hindu tumpah ruah dalam arak-arakan *ogoh-ogoh*—di tahun 1999, massa berpakaian adat membakar rombongan-rombong bakso dan lapak pedagang kaki lima di Kuta. Di bulan Oktober 1999, massa yang rusuh setelah Megawati gagal menjadi presiden, menebangi pohon, membakar gedung perkantoran dan menjarah isinya di tiga kota: Singaraja, Negara, dan Denpasar. Pertarungan massa antar banjar masih berlangsung sampai pertengahan bulan Agustus 2000 ini di sejumlah desa di Bali. Lewat peristiwa-peristiwa tadi, kita masuk ke sudut-sudut gelap dari pulau yang tenar sebagai “sorga terakhir di muka bumi” itu (Wirata, 2002: 471).

### **Tanpa Tanah Tanpa Sejarah: Siasat Manusia Bali di Garis Depan<sup>3</sup>**

Saya kembali teringat bagaimana kisah ketegangan manusia Bali kehilangan (sejarah) tanahnya. Beragam ingatan tentang tanah dengan segudang kisah-kisahnyanya kini mulai berubah drastis. Tanah-tanah yang dulunya melekat dalam kehidupan manusia Bali kini telah terampas oleh penetrasi investasi global bernama pariwisata. Tebing-tebing disulap menjadi villa-villa, hamparan tanah di pesisir pantai telah menjadi *resort-resort* mewah. Bahkan lahan-lahan penuh dengan batu karang dan tebing curam bisa menjadi diskotik atau kafe-kafe.

Kisah di *Desa Pakraman Kerobokan* menunjukkan investor menyasar daerah-daerah pantai yang sering digunakan oleh warga untuk melakukan ritual keagamaan setelah ritual *ngaben*

---

<sup>3</sup> Versi lengkap bagian ini adalah tugas mata kuliah Visualitas, Etnografi dan Dinamika Kebudayaan dengan dosen pengampu, Prof. Dr. P.M Laksono, M.A di Program Doktor (S3) Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta semester genap 2009 dengan judul “Tanah Terjepit, Manusia Bali Menjerit”

dan yang lainnya. Pada April 2007, daerah pinggir Pantai Loloan Yeh Poh dilakukan penyenderan oleh investor PT Bali Unicorn dalam rangka proyek besar membuat resort tepi pantai dengan nama proyek “penataan” Pantai Loloan Yeh Poh di Dusun Tegal Gundul, Desa Pakraman Cunggu. Masyarakat Desa Pakraman Cunggu tanpa tahu menahu saban hari mendengar deru truk-truk membawa material untuk penyenderan dan pengurukan bibir Pantai Loloan Yeh Poh. Bukan hanya proyek penyenderan saja ternyata, bangunan-bangunan permanen dan gazebo-gazebo berjejer sepanjang pantai. Sementara alat-alat berat untuk penyenderan pantai terus bekerja siang dan malam. Meski ada keluhan dan protes warga, gunjingan di bale banjar, tetap saja proyek tersebut jalan terus. Truk-truk dengan angkuh menderuderu menurunkan batu-batu untuk menguruk Pantai Loloan Yeh Poh.

Warga Desa Pakraman Cunggu pun marah dan melawan. Pada 11 April 2007, *krama* (warga) adat Desa Pakraman Kerobokan dengan berpakaian adat membunyikan *kulkul bulus* (bunyi kentungan bertalu-talu tanda bahaya) memanggil seluruh warga keluar rumah. Warga kemudian berkelompok menghadang truk pengangkut material yang dikawal patroli polisi. Warga memblokir jalan menuju Pantai Loloan Yeh Poh. Warga menuntut penghentian pengurukan pantai sekarang juga. Dalam proses investor masuk ke Pantai Loloan Yeh Poh, *karma* adat Desa Pakraman Cunggu sama sekali tidak mendengar apalagi dilibatkan dalam rencana proyek ini. Para pejabat birokrasi dan Bupati Badunglah yang menandatangani izin penataan Loloan kepada PT Bali Unicorn (*Bali Post*, 12 April 2007).

Saya juga teringat kisah di wilayah *Desa Pakraman* Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Sekelompok petani *subak* melakukan protes terhadap pemilik hotel megah di depan hamparan sawah berundak-undak milik para petani. Kelompok petani *subak* ini protes karena pihak hotel tidak memberikan mereka bayaran atas pemandangan sawah yang dinikmati gratis oleh para wisatawan. Cara petani *subak* ini protes tidak dengan merusak fasilitas atau

menyegel hotel, namun membentangkan seng di sepanjang pemandangan hamparan sawah saat para wisatawan makan siang dan menikmati pemandangan. Namun sayang, bukan pemandangan hamparan sawah berundak-undak yang didapat para wisatawan, namun suasana tidak menyenangkan karena di tengah terik matahari, sinar terpantul seng menjadi silau.

Dalam carut marut industri dan ketegangan pariwisata, rakyat mempunyai siasatnya sendiri. Michel de Certeau (1984) menunjukkan bagaimana praktik kehidupan sehari-hari dilakukan oleh rakyat kebanyakan dalam tempat dan ruang tertentu. Dalam ruang yang terhimpun praktik-praktik kegiatan manusia tersebut, terdapat budaya-budaya yang sangat biasa, yaitu praktik hidup keseharian manusia. Wujud dari praktik keseharian itu diterjemahkan melalui budi bahasa yang juga sangat biasa, jauh dari kesan elite dan “berwibawa”. Berpijak pada teoretisi Bourdieu tentang *habitus* dan Foucault tentang struktur kekuasaan, de Certeau menunjukkan bahwa dalam sebuah kebiasaan hidup masyarakat (*habitus*), praktik-praktik manusia sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan (aparatus pejabat pemerintah, ideologi, prosedur birokrasi, teknik) dan *habitus* itu sendiri tentunya.

Dilema hidup Pugeg dan masyarakat Bali pada umumnya tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap pariwisata. *Habitus* terhadap Bali adalah budaya dan pariwisata. Tanah-tanah di Desa Kerobokan perlahan ludes terjual karena struktur kekuasaan pariwisata dan pembangunan yang membentuk Bali. Rakyat bersiasat, melawan yang membuat rakyat menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kekuasaan. Meski tampak manis di depan kekuasaan, rakyat bisa melakukan siasat perlawanan pada kebijakan kekuasaan yang membelenggunya dengan cara-cara keseharian mereka seperti yang ditunjukkan petani di Desa Tegalalang. Oleh karena itulah, gerakan-gerakan resistensi sering lahir akibat respon terhadap struktur kekuasaan dan upaya pembongkaran *habitus* masyarakat sendiri. Seperti potret dari *krama* Desa Kerobokan dan petani subak Desa Tegalalang.



Praktik dan taktik manusia inilah yang sering disebut dengan siasat. Dalam siasat, manusia dihadapkan langsung dengan kenyataan di lapangan, fakta di depan mata yang membutuhkan cara, taktik untuk menghadapinya. Berbeda dengan strategi yang masih di atas meja atau kertas yang berupa rancangan untuk menghadapi kenyataan. Dalam siasat inilah, praktik keseharian manusia mengandung beragam makna dan pergolakan manusia dan kebudayaan yang sering dilupakan.

Melihat siasat manusia Bali yang menjerit karena tanahnya tergadaikan, resistensi terhadap pariwisata dan pembangunan akan terus terjadi. Massifnya industri pariwisata dan pembangunan di Bali akan mengundang jeritan-jeritan resistensi rakyat Bali yang dipraktikkan dalam keseharian hidup mereka dengan berbagai cara. Dalam praktik sehari-hari kebiasaan dan resistensi rakyat Bali terhadap pariwisata dan pembangunan itulah politik kebudayaan Bali dibangun.

### **Manusia Bali Hampa Makna (Antah Berantah): Sebuah Refleksi**

Mengikuti kisah fragmen-fragmen keseharian manusia Bali berelasi dengan dunia global bernama pariwisata, saya jadi teringat lukisan yang tajam Y.B. Mangunwijaya dalam *Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa* (1987) yang merefleksikan relasi sosial yang terjadi di negeri ini. Hampir semua masyarakatnya terjebak dalam lingkaran saling melenyapkan satu dengan yang lainnya. Perumpamaan Ikan Hiu menggambarkan kekuatan kapital (kuasa modal). Ikan Ido mencitrakan ketamakan penguasa lokal (baca: negara) yang dengan semena-mena memakan Ikan Homa, yang tidak lain adalah rakyatnya sendiri. Pada akhirnya, Ikan Ido juga termakan oleh keganasan Ikan Hiu. Semuanya pasrah, tergantung, dan menyerahkan kehidupannya kepada kekuatan lain diluar kuasa bahkan bayangan kita.

Apakah pariwisata bisa menginspirasi perdamaian untuk memanusiakan manusia seperti ide seminar internasional ini? Saya sangat pesimis ketika melihat bagaimana tingkah polah jejaring politik global bernama pariwisata merenggut relasi historis rakyat

tempatan terhadap tanahnya. Globalisasi pariwisata memang benar telah mensejahterakan segelintir rakyat, tapi menggerus tanah dan mengeksploitasi sebagian besar rakyat. Komunitas rakyat tempatan juga harus berjuang menegakkan identitasnya ditengah gempuran modal industri pariwisata. Semuanya menjadi komoditas, barang dagangan produksi kapitalis dan sebagai obyek hasrat konsumen, termasuk budaya dan kesenian rakyat Bali untuk tampak eksotik di depan pariwisata.

Tentu sangat banyak manusia Bali yang berada di tepi “sukses pariwisata” yang selalu diulang-ulang ceritanya. Mereka selalu dikalahkan, termakan oleh Ikan Hiu dan Ikan Hido yang haus kekuasaan. Rakyat Bali dengan tanahnya telah lama menjadi incaran para investor dan kekuatan investasi global dengan dalih “mengembangkan pariwisata”. Rakyat kecil ini berada di garis depan (*frontier*) perebutan sumber daya untuk kepentingan kekuasaan politik (kapital) global. Kondisi terjepit itu diperparah dengan kuasa politik lokal yang bukannya melindungi rakyat tempatan, tapi malahan berkolaborasi dengan kekuatan modal untuk menindas rakyatnya sendiri. Kasus-kasus perambahan lingkungan untuk industri pariwisata tidak jarang terjadi di Bali.

Terlalu banyak contoh yang menunjukkan bagaimana pongahnya penetrasi kuasa politik (globalisasi) merasuk mengobrak-abrik sejarah rakyat tempatan terhadap tanah kelahirannya. Di Papua Barat misalnya, pembukaan perkebunan kelapa sawit, investasi besar perusahaan pertambangan, pembalakan hutan, hingga penetrasi modal melalui pendirian *mall-mall* hingga hotel berbintang menyisakan kompleksitas persoalan terhadap posisi rakyat tempatan. Tanah mereka habis terjual, akses ekonomi yang semakin sulit, relasi historis terhadap tanah mereka yang terputus membuat mereka terhimpit.

Kondisi rakyat tempatan di garis depan pertemuan kekuatan-kekuatan global inilah yang oleh Anna Lowenhaupt Tsing (2005) disebut dengan friksi. Di dalamnya terdapat fragmen-fragmen kisah manusia untuk mementaskan siasat, resistensi, memanfaatkan peluang sekaligus bernegosiasi. Rakyat tempatan

berada di daerah “hampa makna”, dimana relasi historis akan tanah dan budaya mereka terdesak oleh situasi friksi. Dalam kondisi friksi ini, apa saja akan menjadi komoditas yang dilahap oleh kekuatan modal dan politik global untuk melipatgandakan keuntungan (Laksono, 2009a). Rakyat tempatan dalam kondisi friksi tersebut harus berjuang menegakkan identitas dan eksistensi mereka. Yang terjadi kemudian adalah rakyat tempatan menjadi manusia antah berantah, yang tidak lagi peduli dengan asal-usul historis mereka terhadap tanah, tradisi dan budaya. Rakyat tempatan berada dalam lingkaran setan “hukum rimba” saling melenyapan.

Fragmen-fragmen manusia yang “dikalahkan” membuka ruang refleksi yang dalam pada hubungan antara kebudayaan dan identitas diri manusia yang terus berubah. Kebudayaan menawarkan ruang bagi refleksi kritik diri manusia dalam rentang sejarahnya. Diri manusia bukanlah substansi, tetapi subyek yang terus bergerak, jadi diri manusia, dan juga demikian dengan identitasnya adalah sebuah gerakan sosial.

Wacana kritik kebudayaan di satu sisi adalah ruh sekaligus refleksi identitas diri manusia sendiri. Refleksi atas diri terus akan berubah, bergerak terus menerus tanpa henti dalam ruang dan waktu. Di dalamnya terdapat kisah-kisah kelokan tajam. Pemahaman historis dalam konteks kebudayaan menjadi sangat penting untuk memahami konteks perubahan yang terjadi. Pemahaman kebudayaan dengan perspektif reflektif diri berkaitan dengan revolusi kesadaran historis manusia akan hakekat hidupnya. Pada titik inilah dilantunkan eksistensi manusia yang terbentang antara masa lampau dan masa depan. Pemahaman kebudayaan dengan demikian bertumpu pada pemahaman atas diri sendiri dalam konteks historisnya.

Bagi manusia, memahami kebudayaan juga berarti pemahaman dirinya, identitasnya sendiri. Jika demikian, memahami kebudayaan lain (antarbudaya), selain berusaha untuk belajar bersama-sama kebudayaan tersebut juga adalah memahami diri manusia tersebut. Semangatnya adalah mengapresiasi

budaya lain dan juga dalam rangka menemukan identitas diri yang inklusif, dinamis, transformatif, dan dengan demikian juga dialektis. Melalui perspektif antar budaya, kita akan diajak untuk menyelami perbedaan sebagai sebuah cermin untuk melihat kembali jauh ke dalam diri masing-masing betapa seringkali kita membentengi diri, menganggap diri sendiri yang paling baik dan mengecilkan peran masyarakat dan budaya lain yang ada di luar kedirian kita. Proses refleksi yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mengapresiasi pengalaman-pengalaman masyarakat dan identitas yang berbeda-beda secara partisipatoris. Dengan demikian, proses mediasi dan pemberdayaan masyarakat tempatan menjadi usaha yang bersama-sama untuk membangun sejarah baru (Pujiriyani dan Anantasari, 2010).

Antropolog P.M. Laksono (2009b) mengungkapkan, kompleksitas rakyat tempatan menghadapi penetrasi kuasa politik globalisasi menyebabkan identitas dan kebudayaan lokal terus-menerus direproduksi tanpa henti. Apa saja akan menjadi komoditi, barang dagangan, direproduksi terus-menerus. Identitas budaya bagi masyarakat tempatan pada dunia friksi ini menjadi sangat problematik karena akan direproduksi terus-menerus dalam interkoneksinya dengan kekuatan global dan siasat (berpolitik) yang tiada henti.

Untuk menangkap dinamika inilah antropolog sepatutnya menggunakan perspektif wacana mata orang kecil. Pedekatannya adalah dengan dengan melihat proses kognitif, yaitu pada proses kesadaran pembentukan makna dan menemukan penafsiran-penafsiran dibalik ekspresi-ekspresi budaya rakyat tempatan. Untuk menangkap itu, antropolog bersama-sama rakyat tempatan berpolitik untuk membangun sejarah baru. Antropologi terlibat dalam proses-proses sosial yang terjadi. Oleh karena itulah antropologi adalah refleksi dari gerakan sosial untuk mengungkap relasi-relasi kekuasaan yang meminggirkan rakyat tempatan (Laksono, 2009a). Praksis yang bisa dilakukan adalah antropolog bersama-sama rakyat tempatan berbagi pengalaman untuk mengungkap relasi-relasi ketidakadilan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, I Gusti Ngurah. 1999. "Keresahan dan Gejolak Sepuluh Tahun terakhir di Bali: Beberapa Catatan tentang Perubahan Sosial di Era "Glokalisasi"" dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed), *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard*, Jakarta, Ecole Francaise dExtreme-Orient, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Yayasan Obor Indonesia.
- Bali Post*, 12 April 2007.
- De Certeau, Michel. 1984. *The Practice of Everyday Life*, California: University of California Press.
- Laksono, PM. 2009a. "Peta Jalan Antropologi Indonesia Abad Kedua Puluh Satu: Memahami Invisibilitas (Budaya) di Era Globalisasi Kapital". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Laksono, P.M. 2009b. *Spektrum Budaya (Kita)*, Yogyakarta: Kepel Press, Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada dan Ford Foundation.
- Kompas*, 22 Februari 2008.
- Mangunwijaya, Y.B. 1987. *Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa (Sebuah Novel Sejarah)*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Mantra, Ida Bagus. 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Dharma Sastra.
- Mudana, Gde. 2005. "Pembangunan Bali Nirwana Resort di Kawasan Tanah Lot: Hegemoni dan Perlawanan di Desa Beraban, Tabanan, Bali"(desertasi) Program Doktor, Program Studi Kajian Budaya, Program Pascasarjana, Universitas Udayana Bali.
- Nordholt, Henk Schulte. 2002. *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nordholt, Henk Schulte. 2010. *Bali Sebuah Benteng Terbuka*. Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV
- Pitana, I Gde. 1999. *Pelangi Pariwisata Bali, Kajian Aspek Sosial Budaya Kepariwisata Bali di Penghujung Abad*, Denpasar:

Bali Post.

- Picard, Michel. 2006. *Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*, Jakarta: KPG.
- Pitana, I Gde. 1999. *Pelangi Pariwisata Bali, Kajian Aspek Sosial Budaya Kepariwisataaan Bali di Penghujung Abad*, Denpasar, Bali Post.
- Pujiarini Dwi Wulan dan Esti Anantasari. 2010. *Panduan Penelitian Lapangan Antarbudaya*, Yogyakarta, PSAP UGM dan Ford Foundation
- Robinson, Geoffery. 2006. *Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik*, Yogyakarta, LKiS.
- Santikarma, Degung. nd. "Budaya, Kuasa, dan Pariwisata", makalah tidak diterbitkan.
- Santikarma, Degung. 2003. "Ajeg Bali: Dari Gadis Cilik ke Made Schwarzenegger", *Kompas* 7 Desember 2003.
- Setia, Putu. 1986. *Menggugat Bali*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sujaya, I Made. 2002. *Sepotong Nurani Kuta, Catatan Seputar Sikap Warga Kuta dalam Tragedi 12 Oktober 2002*, Denpasar: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kuta.
- Suryawan, I Ngurah. 2010. *Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara di Bali Utara*, Jakarta: Prenada Media
- Tsing, Anna Louwenhaupt. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton and Oxford: Princeton University Press
- Vickers, Adrian. 1989. *Bali: A Paradise Cretated*. Victoria: Penguin.
- Wirata, Putu. 2002. "Bali, Kristalisasi dan Resistensi Kultural" (hlm. 471-483) dalam *Bentara Esei-esei 2002*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.